

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PDRB DAN PAD

Harry A. P. Sitaniapessy

*Politeknik Negeri Ambon
macarthur_sita@yahoo.com*

Abstrak: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah periode 2005-2011. Penelitian ini lebih difokuskan pada tiga sektor utama yaitu sektor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor – sektor lain. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana untuk empat hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract: Government Expenditure Influence on Gross Regional Domestic Product and Regional Income. This study aims to determine the impact of government expenditure towards GRDP and PAD of Kabupaten Maluku Tengah in period 2003-2011. This study are focused to three majors of government expenditure ; agriculture, fishery, industry and commerce, because they have larger expenditure than the others. The analysis of the data were conducted using simple regression analysis and multiple regression. Testing was done using multiple regression and simple regression for the four hypotheses tested. The result shows that the four hypotheses proposed in this study is supported.

Keywords: government expenditure, gross regional domestic product, regional income

PENDAHULUAN

Sejak otonomi daerah dijalankan, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang nyata, transparan, efektif dan efisien. Pembiayaan pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas

dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada ketiga dasar tersebut diperlukan biaya/anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam segala bidang, di samping itu pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pe-

nerimaan yang sah, anggaran biaya untuk dekonsentrasi dan anggaran biaya tugas pembantuan. Disadari akibat krisis multidimensional tahun 1997 sumber pendapatan asli daerah yang makin merosot akibat Krisis yang diawali dari krisis moneter dan konflik sosial pada tahun 1999 sampai tahun 2004 yang mengakibatkan sumber keuangan daerah terbatas. Lahirnya Otonomi Daerah disambut dengan berbagai harapan dan kecamasan oleh segenap masyarakat di daerah artinya sebagian masyarakat di daerah bermimpi bahwa otonomi daerah akan menjadikan masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Namun tidak sedikit pula daerah yang cemas karena menyadari minimnya potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Pada era otonomi ini Pemerintahan Pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini tercermin pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan pelaksanaan azas desentralisasi dari pada azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang dibiayai dari dana APBD tahun 1993 belum mengalami perubahan drastis sampai dengan tahun 2009 akibat Konflik Sosial terjadi di Daerah Maluku maka fenomena dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah makin lemah dan program pemerintah yang diterapkan di segala bidang meliputi

bidang sosial, keamanan, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan sumber daya alam dan lingkungan serta sarana dan prasarana wilayah yang direncanakan di daerah belum berjalan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur pemerintahan dan segmentasi ideologis di kalangan birokrasi pemerintahan daerah akibat tekanan kondisi pertikaian, menyebabkan tugas pokok Pemerintah Daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan akuntabel. Sejalan Kewenangan otonomisasi daerah yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Menurut Mangkoesoebroto (1998), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh alokasi Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB dan Implikasinya pada Pendapatan Asli Daerah. Pengeluaran Pemerintah lebih mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan *output* secara *agregat*. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan me-

naikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD. Penelitian ini lebih difokuskan pada tiga sektor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut merupakan memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor-sektor lain.

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor yang dianggap penting. Sektor-sektor fundamental yang menjadi saluran pengeluaran pemerintah adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sektor-sektor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus daerah atau Negara yang diteliti. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada 3 sektor utama yang memiliki proporsi pengeluaran terbesar di Kabupaten Maluku Tengah yaitu sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Perindustrian dan Perdagangan. Karena sektor tersebut memiliki pengeluaran yang besar maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya pada pendapatan asli daerah. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap

pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat diberikan masukan

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengeluaran pemerintah sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan serta Sektor perindustrian dan Perdagangan berpengaruh terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Maluku Tengah. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan serta Sektor perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu. Menurut Sukirno (2004) persoalan pokok dalam perekonomian adalah pengangguran, inflasi, keleluasan pertumbuhan ekonomi, dan ketidakstabilan neraca pembayaran. Bentuk utama dari kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan

hanya beberapa hal pemerintah yang dibawanya dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Menurut Suparmoko (2004), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :UU Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Putra, 2009). Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang masih relatif rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat (Kunco-ro, 2004). Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Krisis

ekonomi global yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan dalam perekonomian suatu negara tidak bisa dengan hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi sektor pemerintah juga sangat diandalkan. Terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan net ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Penerimaan Kabupaten atau Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinja-

man. Di samping proyek pemerintah pusat dan proyek pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten atau Kota, juga terdapat proyek Kabupaten Kota yang tercermin dalam APBD Kabupaten Kota yang bersangkutan di dalamnya terdapat PAD yang bebas dipergunakan oleh Kabupaten Kota tersebut sesuai dengan skala prioritasnya. Bahkan peranan PAD dan APBD Kabupaten Kota dalam pembangunan daerah sangat penting, karena kadang-kadang diperlukan sebagai dana pendamping untuk proyek pusat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo dkk (2008) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Sistem sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat selama ini melahirkan krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda dan memberikan dampak positif dan dampak negative bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan memunculkan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal penetapan kebijakan yang diambil di daerah dikarenakan selalu menanti kebijakan yang diatur dari pusat dan berlaku secara umum di daerah, termasuk di dalamnya adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa subsidi dan transfer untuk pendanaan pembangunan yang dilakukan di daerah. Untuk itu diperlukan pemberian kewenangan ke-

pada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Mardiasmo, 2008). Perubahan dari pola pikir sentralisasi ke pola pikir desentralisasi, dalam arti penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom, sangat dibutuhkan saat ini. Kalau dulu untuk mengambil keputusan menunggu penunjuk dan pengarahan dari pusat dalam bentuk usulan-usulan strategis, sejalan dengan itu memunculkan undang-undang untuk mengelola administrasi pemerintah daerah serta pemberdayaan keuangan daerah untuk lebih berguna bagi pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusiannya merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan sumber pendapatan pembangunan daerah (Yustika, 2006:99)

Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pem-

biayaan dengan prinsip dasarnya yang mengikuti fungsi (*Money Follow Function*) (Yuwono, 2008). Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di daerah dengan kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan peraturan pelaksanaannya berupa PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sampai saat ini 4 terjadi ketimpangan yang relatif besar terhadap distribusi kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah yang tercermin dari jumlah penerimaan pajak yang tidak berdampak besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pembiayaan kebutuhan di sebagian besar daerah pada kenyataannya hanya memiliki PAD kurang dari 10% dan hal ini sangat bervariasi di setiap daerah yakni antara 10% - 50% karena kewenangan perpajakan (*taxing power*) daerah sangat terbatas dan akhirnya akan bermuara pada rendahnya kemampuan keuangan daerah (Yuwono,2008).

Penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini antara lain Estache (2007) dalam penelitiannya yang menemukan Hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk Negara kaya dengan sektor publik yang luas. Sedangkan Negara sedang berkembang lebih berorientasi men-

gembangkan ukuran pemerintah untuk perlindungan hak kepemilikan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara lain

Abu-Daber & Amer (2003) menemukan bahwa pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir. Hasil yang agak berbeda ditemukan oleh Sodik (2007) yang menemukan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000.

Widodo (2010) menemukan bahwa IPM berperan sebagai variabel *pure moderating* dan juga sebagai variabel *intervening* dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik tidak berpengaruh langsung terhadap IPM maupun kemiskinan. Pengeluaran pemerintah sektor publik tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Pascual dan Álvarez-García (2006) meneliti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara Eropa mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sampel penelitian. Seperti halnya penelitian ini yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

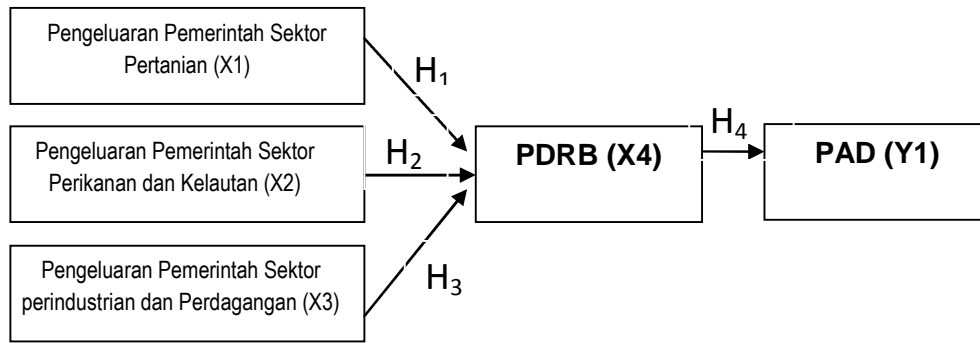
Kurniawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 1993 – 2006 menemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Kedua, Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga, Pengeluaran Pemerintah Sektor perindustrian dan Perdagangan berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Keempat, PDRB Memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Jenis Data yang dipergunakan untuk keperluan analisis dan penarikan kesimpulan adalah berupa data Time Series dari Tahun 2005 - 2011 yang meliputi seluruh variabel yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Kelautan serta Sektor Perindustrian dan Perdagangan, PDRB dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari kajian literatur berupa artikel hasil penelitian terdahulu,



Gambar 1. Model Penelitian

buku-buku dan juga data dari instansi terkait di Kabupaten Maluku Tengah seperti BPS dan Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah. berupa Data mengenai Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD selama kurun waktu tahun 2005 – 2011.

Sebelum menganalisis data maka dilakukan terlebih dahulu: (1) uji stasioner data dengan menggunakan *Augmented Dickey-Fuller test statistic*, (2) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan sederhana.

Persamaan matematis untuk perhitungan regresi adalah

$$X_{4(t)} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t-1} + \alpha_2 X_{2t-1} + \alpha_3 X_{3t-1} + \varepsilon_1$$

$$Y_{1(t)} = \beta_0 + \beta_1 X_{4t-1} + \varepsilon_2$$

Keterangan:

X_1 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

X_2 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan

X_3 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Y_1 = PDRB Kabupaten Maluku Tengah

Y_2 = PAD Kabupaten Maluku Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis data dan arena data yang digunakan adalah merupakan data time series maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan uji stasioner data. Uji stasioner data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji akar unit dengan menggunakan *Augmented Dickey-Fuller test statistic*. Jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut

Tabel 1. Hasil Uji Stasioner Data

Variabel	Level		1 st difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob
Pertanian	-2,10876	0.2467	-4,921609	0,0001
Perikanan & Kelautan	-2,00261	0,3124	-4,874981	0.0003
Perindustrian	-1,04560	0,6160	-3,354621	0.0043
PDRB	-1,93368	0,3973	-3,123412	0,0067
PAD	-2,11362	0,2657	-4,363621	0,0002

telah stasioner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima variabel yang diujikan telah stasioner pada *1st difference* dan dengan demikian bisa dilakukan estimasi lanjutan. Hasil uji stasioner data dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil pengujian Normalitas untuk persamaan pertama menunjukkan bahwa nilai *asympt.sig/asymptotic significance* dua sisi adalah 0,988 atau probabilitas di atas 0,05 ($0,988 > 0,05$). Kemudian pada persamaan kedua nilai *asymptotic significance* dua sisi adalah 0,988 atau probabilitas di atas 0,05 ($0,988 > 0,05$). Dengan demikian data yang digunakan dalam regresi pada kedua persamaan terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diketahui bahwa tidak ada korelasi antar variabel – variabel independen yang diujikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin-Watson adalah se-

bagai berikut: taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Hasil perhitungan Durbin Watson berdasarkan hasil regresi pada persamaan pertama adalah 1,949. Nilai *dL* dan *dU* pada signifikansi 0,05, $n=7$ (jumlah sampel) dan $k=3$ (jumlah variable independen) didapatkan $dL = 0,467$ dan $dU = 1,896$. Jadi dapat dihitung $4-dU = 4 - 1,896 = 2,104$ dan $4-dL = 4-0,467= 3,533$. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai *d* (Durbin Watson) terletak pada daerah $dU < d < 4-dU$ ($1,896 < 1,949 < 2,104$). Hasil perhitungan Durbin Watson berdasarkan hasil regresi pada persamaan kedua adalah 1,576. Nilai *dL* dan *dU* pada signifikansi 0,05, $n= 7$ (jumlah sampel) dan $k=1$ (jumlah variable independen) didapatkan $dL = 0,700$ dan $dU = 1,356$. Jadi dapat dihitung $4-dU = 4 - 1,356 = 2,644$ dan $4-dL = 4-0,700= 3,300$. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai *d* (Durbin Watson) terletak pada daerah $dU < d < 4-dU$ ($1,356 < 1,576 < 2,644$). Dengan demikian kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi pada kedua model regresi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>
Sektor Pertanian	0,833	1,200
Perikanan dan Kelautan	0,771	1,297
Perindustrian dan Perdagangan	1.000	1,000
PDRB (persamaan 2)	0.721	1,386

Tabel 3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Kelautan, serta Perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB

Variabel Independen	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
Pertanian	0,493	2,957	0,042
Perikanan dan Kelautan	0,245	4,115	0,000
Perindustrian dan Perdagangan	0,532	8,859	0,000

Penelitian ini memiliki 4 hipotesis yang diujikan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan sederhana dengan analisis jalur. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan 2 kali pengujian yaitu untuk hipotesis pertama (H1) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, hipotesis kedua (H2) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan hipotesis ketiga (H3) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Perindustrian dan Perdagangan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sementara itu untuk Hipotesis keempat (H4) yaitu Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah,

Hasil Pengujian untuk Hipotesis 1, Hipotesis 2 dan Hipotesis 3 adalah seperti yang terlihat pada Tabel 3. Besarnya angka R^2 (*R Square*) untuk pengujian pertama yaitu pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Sektor Perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 0,933. Hasil ini mempunyai maksud bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Sektor Perindustrian dan Perdagangan mempunyai pengaruh gabungan terhadap PDRB sebesar 93,3% sementara

sisanya sebesar 6,7% (100% - 93,3%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini ditunjukkan dengan nilai standard beta sebesar 0,493, nilai *t* hitung 2,957 lebih besar dibandingkan *t*-tabel 2,776 (*t*-hitung > *t*-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,042 ($p < 0,005$). Dengan demikian Hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor pertanian memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pembangunan yang ditujukan untuk sektor pertanian sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Maluku Tengah Sektor pertanian adalah merupakan tulang punggung perekonomian. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk urusan pilihan bidang pertanian telah dialokasikan untuk program kesejahteraan petani, program peningkatan penerapan teknologi pertanian, program peningkatan produksi pertanian serta program pemberdayaan penyuluh pertanian. Dari anggaran Pengeluaran Pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pertanian pada saat ini memang sudah cukup menyentuh masyarakat dan memiliki peran bagi pertumbuhan eko-

nomi. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus dipecahkan untuk tetap dapat menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Permasalahan tersebut antara lain Kelembagaan dan kemitraan usaha petani belum sesuai dengan sasaran usaha pengembangan agribisnis secara utuh. Di samping itu wawasan dan kemampuan petani/kelompok tani masih rendah, dengan demikian maka nilai tambah yang diterima petani belum maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan secara intensif kepada petani agar mereka membentuk dan mengembangkan kelompoknya serta mampu bermitra dalam usaha agribisnis. Dengan memperhatikan permasalahan di atas dengan pengalokasian anggaran Pengeluaran Pemerintah Sektor pertanian yang cukup maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan Kelautan berpengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini ditunjukkan dengan nilai standard beta sebesar 0,245 nilai t hitung = 4,155 lebih besar dibandingkan t-tabel 2,776 (t-hitung > t-tabel) dengan tingkat signifikansi 0,009 ($p < 0,005$). Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor perikanan dan kelautan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Sektor Perikanan dan kelautan di Kabupaten Maluku Tengah disalurkan melalui program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tengah

pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang kelautan dan pesisir dan pulau-pulau kecil serta beberapa UPTD yang ada seperti balai benih air tawar, balai sarana dan prasarana perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor Perikanan dan Kelautan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor pertanian dan perikanan, serta sektor industri dan Perdagangan). Di Kabupaten Maluku Tengah Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena secara geografis wilayah Maluku tengah memiliki luas laut yang lebih besar dari luas daratan. Akan tetapi potensi ekonomi yang ada belum mampu direalisasikan secara optimal. Sejauh ini pemerintah provinsi memang telah mengambil langkah untuk mengembangkan potensi ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas upaya tersebut belum terlalu optimal yang dikarenakan oleh terlalu luasnya wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya Sumber daya manusia (SDM) nelayan sehingga masih sulit mengadopsi perkembangan teknologi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu untuk menganggarkan dana untuk menyertakan Nelayan dalam pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang (sarana transportasi bagi masyarakat terpencil sehingga sulit untuk menjangkau daerah-daerah penangkapan dan daerah pemasaran. Anggaran juga sebaiknya dialo-

kasikan untuk pengembangan riset dan teknologi hasil perikanan sehingga mutu hasil produk perikanan olahan dari Kabupaten Maluku Tengah dapat memiliki nilai jual dan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi penganggaran bidang perikanan dan kelautan dapat diarahkan untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana Laboratorium, Loka Budidaya dan Pelabuhan Perikanan; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sentra-sentra produksi perikanan; pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan ilegal fishing; pengembangan bibit ikan unggul dan peralatan tangkap, serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Perindustrian dan Perdagangan berpengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini ditunjukkan dengan nilai standard beta sebesar 0,532 nilai t hitung = 8,859 lebih besar dibandingkan t-tabel 2,776 ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,005$). Dengan demikian Hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor Perindustrian dan Perdagangan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Pengeluaran Pemerintah Sektor Perindustrian dan Perdagangan disalurkan melalui program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor Perindustrian dan Perdagangan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB (sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor pertanian dan perikanan,

serta sektor industri dan Perdagangan). Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan di Maluku dapat dilihat bahwa sebagian besar industri yang ada adalah merupakan industri rumah tangga ataupun industri pada level kecil dan menengah yang masih membutuhkan bantuan pemerintah khususnya masalah pendanaan untuk investasi tersebut. Selain masalah pendanaan untuk meningkatkan modal usaha, masih terdapat banyak kekurangan yang dimiliki seperti minimnya kemampuan sumber daya manusia yang masih mengandalkan pola-pola tradisional dalam melaksanakan aktivitas mereka. Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perindustrian dan perdagangan adalah dengan meningkatkan anggaran belanja yang dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil menengah misalnya pemberian bantuan sarana dan peralatan industri yang representatif yang dapat membantu usaha mereka. Selain itu pendidikan dan pelatihan serta workshop bagi stakeholder di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Maluku Tengah sebaiknya diarahkan pada industri yang memiliki daya saing tinggi dan bertumpu pada SDM yang kuat. Dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan industri yang sehat, meningkatkan kapasitas industri secara optimum. Dengan demikian jika hal tersebut dapat dijalankan maka sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung = 9.657 lebih besar dibandingkan t -tabel 3,182 (t -hitung > t -tabel) dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,005$). Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap PAD. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD. Seperti yang dikemukakan oleh Brata (2004), yang mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan asli daerah merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seragih (2003) yang menyatakan peningkatan pendapatan asli daerah mempunyai eksis dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Hal yang sama juga dilakukan oleh Bappenas (2003) yang membuktikan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap kenaikan PDRB. Perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tengah yang meningkat merupakan cerminan potensi aktivitas perekonomian di Kabupaten Maluku Tengah, dengan berkem-

bangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB dapat membawa dampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat dengan berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan Pendapatan masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai contoh dalam PDRB Kabupaten Maluku Tengah sektor pertanian (sektor primer) memiliki peranan yang sangat besar yaitu sebesar 31,53% atau lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Sekalipun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sektor pertanian cenderung menurun tetapi sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Maluku mengalami pergeseran dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan sektor tersier seperti Industri pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan. Dengan bergesernya perekonomian daerah ke arah sektor sekunder dan sektor tersier seperti akan berimplikasi pada semakin meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah karena kedua sektor inilah yang memiliki potensi pajak daerah yang lebih besar dibandingkan sektor primer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Sektor Perindustrian dan Perdagangan baik se-

cara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan temuan tersebut hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah perlu terus meningkatkan Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta perindustrian dan perdagangan untuk menunjang aktivitas sektoral sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ketiga sektor tersebut. Selain itu Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah yang akan berimplikasi pada meningkatnya APBD. Bagi peneliti lain diharapkan lebih menguraikan variabel Pengeluaran Pemerintah secara keseluruhan sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Dabe, S. & Aamer S. (2003) *Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria*. <http://ssrn.org/163>. Diakses tanggal 10 november 2011.
- Estache, A., et.al. (2007) "Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Government". *World Bank Policy Research Working Paper 4219*. <http://ssrn.org>. Diakses 10 November 2011.
- Kuncoro, M. (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, A.L. (2008) "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 1993-2006". *Skripsi Unair*, Tidak Dipublikasikan.
- Mangkoesebroto, G. (1998) *Ekonomi Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2004) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo (2008) *Perpajakan edisi revisi 2008*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Pascual, M. & Álvarez-García, S. (2006) *Government Spending And Economic Growth In The European Union Countries: An empirical Approach*. JEL, <http://ssrn.org>. Diakses tanggal 10 november 2011.
- Putra, A. (2009) Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Logika*, 7(2), 12-25.
- Saragih, Juli Panglima (2003) *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sodik, J. (2007) "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 27-36.
- Sukirno, S. (2004) *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Jakarta Press.
- Suparmoko (2004) *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi ketujuh*. Yogyakarta: BPFE.
- Widodo, A. (2010) "Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia". *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Yustika, A.E. (2006) *Perekonomian Indonesia (deskripsi, preskripsi dan kebijakan)*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Yuwono, S. (2008) *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Surabaya: Bayumedia Publishing.